

RENCANA KERJA

(RENJA)

PERUBAHAN TAHUN 2021



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUMBANG

Jl. Kyai Panumbang Sumbang No.199, Sumbang Dukuh, Sumbang, Kec. Sumbang,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya Pandemi Covid 19 yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah :

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun

- 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.
 33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor ...Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah:

Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2021 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021.

1.4. SISTEMATIKA

BAB IPENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2021 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2021, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
(tahun berjalan)* Kabupaten Banyumas

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Unit SKPD Penanggung Jawab	Permasalahan						
				5	6	7		8		9		10	11	12	13												
			4A	K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
3	mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima																										

		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		86				84	84			20	40	40	47.62									
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat																							
		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100				100	100			100	100	100	100									

		Persen tase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	84			82	82			82	82			100										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.484.849.164		2.484.849.164	2.484.849.164			318.794.600	397.084.850	715.879.450	28.81											
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan	%	100			100	100			100	100			100										

		dokumen penganggaran perangkat daerah																							
		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100				100	100				100	100	100										
		Persentase realisasi keuangan program	%	100				100	100				100	100	100										

		Penunjang Urusan Pemerintahan																							
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100				100																	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.190.000																	
								8.190.000																	
								8.190.000																	

		Doku men	Do ku me n	5			5	5	5			2	2	2	40								
	Administra si Keuangan Perangkat Daerah				1.8 02. 971 .97 2		5	1.8 02. 971 .97 2	5	1.8 02. 971 .97 2			318 .79 4.6 00	397 .08 4.8 50	715 .87 9.4 50		39. 71						
		Terbay arnya Gaji dan Tunjan gan PNS	%	1 0 0			100	100				1 0 0	100	100	100								
	Administra si Umum Perangkat Daerah				196 .95 0.6 92			196 .95 0.6 92		196 .95 0.6 92							0						
		Tersed ianya Peral tan dan Perlen gkapa n Kantor	%	1 0 0			100	100				1 0 0	100	100	100								

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		Tersedianya Barang Milik Daerah	%	100																				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100																				

		Daerah																							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.808.000					81.808.000															
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100						100															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.077.000					13.077.000															
		Persentase permohonan	%	100						100															

		admini strasi kepen duduk an dan PATEN yang terlaya ni secara baik																							
		Persen tase pemba yaran PBB di kecam atan	%											100	100	0									
	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang Dilimpahka n kepada Camat				13. 077 .00 0			13. 077 .00 0		13. 077 .00 0															
		Terfasi litasiny a Pelaya	%	1 0 0				100	100				1 0 0		100	100	100								

		nan Kependudukan (PATEN)																						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20. 120 .00 0			20. 120 .00 0		20. 120 .00 0									0					
		Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80			80						95		95				100					

		Persen tase desa/k elurah an yang memili ki dokum en perenc anaan yang baik	%	1 0 0				100		100															
	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa				20. 120 .00 0				20. 120 .00 0		20. 120 .00 0								0						
		Prosen tase Kelom pok Masya rakat Yang aktif	%	1 0 0				100		100				1 0 0		100		100		100					

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.0 55. 000				4.0 55. 000	4.0 55. 000																											0	
		Prosentase Linmas Terbina	%	100				100	100					100	100	100																						
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				3.8 00. 000				3.8 00. 000	3.8 00. 000																											0	
		Prosentase Linmas Terbina	%	100				100	100					100	100	100																						

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40. 000 .00 0				40. 000 .00 0	40. 000 .00 0											0									
	Prosentase Desa Yang Terbina/terfasilitasi	%	1 0 0			100	100			100	100			100	100			100											

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.298.886.214,- dengan 5 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp 893.133.802, - dengan capaian kinerja fisik sebesar 757.377.324,- dan capaian kinerja keuangan sebesar 135.756.478,- Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, dengan penyerapan anggaran 0%;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan penyerapan anggaran 42,57%.

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, Silpa anggaran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 1.405.752.412,-

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan dalam bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

- a. Masih belum terwujudnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima
- b. Masih belum meningkatnya pelayanan publik yang prima
- c. Masih belum meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sumbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Sumbang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
- 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;

d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

- 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

1.

2.3. Review Terhadap Renja Kecamatan Sumbang Tahun 2021

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian Tujuan Kecamatan Sumbang dan Pemerintah Kabupaten Banyumas maka diperlukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbang sesuai dengan Perubahan Renstra Kecamatan Sumbang.

Ket:

Matrik pertama adalah matrik hasil berita acara pemetaan sebelum dan setelah pemutakhiran

Matrik kedua adalah matrik rankhir renstra perubahan

Matrik Hasil Reviu Renja 2021

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.995.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.190.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AdministrasiKeuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.979.087.152	Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.211.478
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AdministrasiUmm	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	80.588.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	77.717.140
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	AdministrasiUmm	Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan	250.896.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	269.713.200

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.194.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.194.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.040.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.356.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.950.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.950.000
				5.954.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.954.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	4.055.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	3.054.800

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			Kepolisian Negara Republik Indonesia				Kepolisian Negara Republik Indonesia	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	37.040.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	-

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			instansi vertikal di wilayah kecamatan				vertikal di wilayah kecamatan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-
	ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000	ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.800.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.000.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh	4.920.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	3.420.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.210.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	32.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	32.000.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.400.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.979.087.152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.211.478
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.900.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.300.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.954.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.954.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.950.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	57.950.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.929.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.504.900

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.158.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.694.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.333.292	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.776.496

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.040.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.356.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000 -
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.500.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.058.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.058.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.040.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.588.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.717.140

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.194.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.194.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.896.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.713.200

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.995.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.190.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000

NO	PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.749.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.749.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.328.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.328.000

Matrik Perubahan Kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
TOTAL						2.569.901.164
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		84	2.569.901.164
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	6.914.6851.428
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.077.000
			Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	13.077.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.077.000
			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	1	13.077.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				5.328.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		terkait dengan Nonperizinan				
			pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Orang	10.000	5.328.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.749.000
			Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	19	7.749.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.120.000
			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	20.120.000
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				20.120.000
			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	1	20.120.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8.000.000
			jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	60	8.000.000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4.920.000
			Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	10	4.920.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.200.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Keg	80	7.200.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				11.855.000
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.855.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.800.000
			Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	1	7.800.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3.800.000
			Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	19	3.800.000
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4.000.000
			Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	4	4.000.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.055.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	1	4.055.000
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.055.000
			Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	19	4.055.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.000.000
			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40.000.000
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	19	40.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8.000.000
			Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	19	8.000.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				32.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	3	32.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.484.849.164
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	8.190.000
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.190.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	8	8.190.000
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	8	3.000.000
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.190.000
			Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	30	5.190.000
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.802.971.972
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.802.971.972
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	8	1.802.971.972

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.779.071.972
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	12	1.779.071.972
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23.900.000
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	23.900.000
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	140.058.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58.250.000
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	8	58.250.000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	5	40.000.000
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.250.000
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	5	18.250.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.808.000
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	12	81.808.000
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.058.000
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	7	40.058.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.500.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	19.500.000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.750.000
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	18.750.000
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.500.000
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.500.000
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	533.629.192

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.950.692
			Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	196.950.692
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.040.500
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	20	6.040.500
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.333.292
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	30	33.333.292
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.954.000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	7	5.954.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.950.000
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	10	57.950.000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.929.300
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	8	9.929.300
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.743.600
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	80	83.743.600
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				336.678.500
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	9	336.678.500

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.588.500
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	5	80.588.500
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.194.000
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	3	5.194.000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.896.000
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	10	250.896.000
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		84	2.569.901.164
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	69.146.851.428

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
	pemberdayaan masyarakat					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.077.000
			Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	13.077.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				13.077.000
			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	1	13.077.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.328.000
			pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Orang	10000	5.328.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.749.000
			Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Desa	19	7.749.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.120.000
			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	20.120.000
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				20.120.000
			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	1	20.120.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	60	8.000.000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4.920.000
			Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Kali	10	4.920.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.200.000
			Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Keg	80	7.200.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				11.855.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.855.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.800.000
			Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keg	1	7.800.000
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3.800.000
			Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	unsur	19	3.800.000
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4.000.000
			Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Kali	4	4.000.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan				4.055.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
			Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keg	1	4.055.000
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.055.000
			Jumlah kegiatan pembinaan Linmas	Keg	19	4.055.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.000.000
			Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40.000.000
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Desa	19	40.000.000
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8.000.000
			Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Kali	19	8.000.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				32.000.000
			Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	3	32.000.000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.484.849.164
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	8.190.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.190.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	8	8.190.000
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	8	3.000.000
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.190.000
			Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	30	5.190.000
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.802.971.972

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.802.971.972
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	8	1.802.971.972
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.779.071.972
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	12	1.779.071.972
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23.900.000
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	23.900.000
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	140.058.000
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				58.250.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Pemerintah Daerah				
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	8	58.250.000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	5	400.00.000
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.250.000
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	5	18.250.000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.808.000
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	12	81.808.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.058.000
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	7	40.058.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.500.000
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15	19.500.000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.750.000
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	18.750.000
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung				3.500.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.500.000
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	533.629.192
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				196.950.692
			Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	196.950.692
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.040.500
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	20	6.040.500
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.333.292

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	30	33.333.292
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.954.000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	7	5.954.000
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				57.950.000
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	10	57.950.000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.929.300
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	8	9.929.300
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.743.600

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	80	83.743.600
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				336.678.500
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	9	336.678.500
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.588.500
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	5	80.588.500
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.194.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	3	5.194.000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				250.896.000
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	10	250.896.000
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		84	2.569.901.164

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 1 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen 100 %	13 Orang	12 Orang	100 %	100 %	1,979,087,152	1,779,071,972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	8 Dokumen 100 %	2,547,250,000			
7 0 1 1 2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen 100 %	12 Bulan	12 orang	100 %	100 %	23,900,000	23,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	8 Dokumen 100 %	45,000,000			
7 0 1 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											218,365,092	196,950,692			143,060,000				
7 0 1 1 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	100 % 12 Bulan	75 Buah	20 Jenis	100 %	100 %	6,040,500	6,040,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 % 12 Bulan	8,625,000			
7 0 1 1 6 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	100 % 12 Bulan	12 Bulan	30 Jenis	100 %	100 %	33,333,292	33,333,292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 % 12 Bulan	23,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 0 1 2.0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	100 % 12 Bulan	10 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	5,954,000	5,954,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	100 % 12 Bulan	5,750,000			
7 0 1 0 1 2.0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	100 % 12 Bulan	12 Jenis	10 Bulan	100 %	100 %	57,950,000	57,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	100 % 12 Bulan	30,935,000			
7 0 1 0 1 2.0 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jumlah cetakan yang tersedia	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	100 % 12 Bulan	30000 eksemplar	8 Buah	100 %	100 %	9,929,300	9,929,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	100 % 12 Bulan	17,250,000			
7 0 1 0 1 2.0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	100 % 12 Bulan	12 Bulan	80 kali	100 %	100 %	105,158,000	83,743,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	100 % 12 Bulan	57,500,000			
7 0 1 0 1 2.0 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											77,040,000	58,250,000				149,500,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 1 2.0 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	8 unit 100 %	10 Unit	5 Jenis	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	8 unit 100 %	69,000,000			
7 0 1 1 2.0 1 7 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	8 unit 100 %	10 Unit	5 Unit	100 %	100 %	37,040,000	18,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	8 unit 100 %	80,500,000			
7 0 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											336,678,500	336,678,500			346,590,000				
7 0 1 1 2.0 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	9 Jenis 100 %	12 Bulan	5 Bulan	100 %	100 %	80,588,500	80,588,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	9 Jenis 100 %	74,750,000			
7 0 1 1 2.0 0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan yang dibayarkan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	9 Jenis 100 %	12 Bulan	3 Jenis	100 %	100 %	5,194,000	5,194,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	9 Jenis 100 %	40,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 0 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah Pegawai Non ASN	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	9 Jenis 100 %	12 Bulan	10 Orang	100 %	100 %	250,896,000	250,896,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	9 Jenis 100 %	231,840,000			
7 0 1 0 1 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										100,558,000	81,808,000		86,250,000					
7 0 1 0 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	12 Jenis 100 %	3 Unit	7 Unit	100 %	100 %	40,058,000	40,058,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	12 Jenis 100 %	23,000,000			
7 0 1 0 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	12 Jenis 100 %	12 Unit	15 Unit	100 %	100 %	19,500,000	19,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	12 Jenis 100 %	17,250,000			
7 0 1 0 1 9 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	gedung pemerintah dalam kondisi baik Rumah Dinas dalam kondisi baik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	12 Jenis 100 %	2 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit	100 %	100 %	37,500,000	18,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	12 Jenis 100 %	28,750,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 1 9 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	12 Jenis 100 %	12 Unit	5 Unit	100 %	100 %	3,500,000	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Jenis 100 %	17,250,000			
7 0 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										13,077,000	13,077,000		33,350,000					
7 0 1 2 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										13,077,000	13,077,000		33,350,000					
7 0 1 2 4 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Sumbang	pemohon PATEN yang terlayani pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	Terfasilitasinya Pelayanan Kependudukan (PATEN)	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	1 Jenis 100 %	11882 Orang	11882 Orang 10000 Orang	100 %	100 %	5,328,000	5,328,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Sumbang	1 Jenis 100 %	21,850,000				
7 0 1 2 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Sumbang	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	Terfasilitasinya Pelayanan Kependudukan (PATEN)	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	1 Jenis 100 %	90 %	19 Desa	100 %	100 %	7,749,000	7,749,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Sumbang	1 Jenis 100 %	11,500,000				
7 0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										20,120,000	20,120,000		66,000,000					
7 0 1 3 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										20,120,000	20,120,000		66,000,000					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 3 1 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang	jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan		1 Desa 100 %	19 Kali	60 orang	100 %	100 %	8,000,000	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang	1 Desa 100 %	23,000,000			
7 0 1 3 1 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan		1 Desa 100 %	15 Kegiatan	10 kali	100 %	100 %	4,920,000	4,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang	1 Desa 100 %	34,500,000			
7 0 1 3 1 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan		1 Desa 100 %	100 %	80 kegiatan	100 %	100 %	7,200,000	7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumbang	1 Desa 100 %	8,500,000			
7 0 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											11,855,000	11,855,000			23,000,000			
7 0 1 4 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											4,000,000	4,000,000			5,750,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Sumbang

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 4 1 2	Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman danketertiban umum	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan		1 Kegiatan 100 %	19 Kali	4 Kali	100 %	100 %	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang	1 Kegiatan 100 %	5,750,000			
7 0 1 4 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											4,055,000	4,055,000		5,750,000					
7 0 1 4 2 1	Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan		1 Kegiatan 100 %	30 Kali	1 kegiatan	100 %	100 %	4,055,000	4,055,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang	1 Kegiatan 100 %	5,750,000			
7 0 1 4 3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											3,800,000	3,800,000		11,500,000					
7 0 1 4 3 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	Prosentase Linmas Terbina	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan		1 Kegiatan 100 %	100 %	19 unsur	100 %	100 %	3,800,000	3,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sumbang	1 Kegiatan 100 %	11,500,000			
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											40,000,000	40,000,000		46,500,000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 0 6 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													40,000,000	40,000,000			46,500,000
7 0 1 0 6 2.0 1 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Prosentase Desa Yang terbina/fasilitasi	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	19 Desa 100 %	19 Kali	19 kali	100 %	100 %	8,000,000	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	19 Desa 100 %	11,500,000	
7 0 1 0 6 2.0 1 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase Desa Yang terbina/fasilitasi	Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	100 %	19 Desa 100 %	3 Desa	3 Desa	100 %	100 %	32,000,000	32,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	19 Desa 100 %	35,000,000	
TOTAL												2,828,870,744	2,569,901,164			7,051,250,000		

BAB IV

P E N U T U P

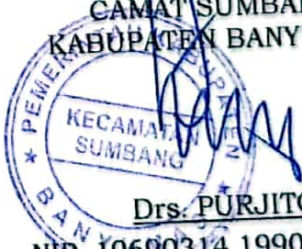
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Sumbang Tahun 2021. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Sumbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sumbang Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Sumbang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Tahun 2021 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.

CAMAT SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. PURJITO
NIP. 19690314 199009 1 001